



RENCANA KERJA TAHUN 2022



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022. Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal,

KEPALA BAPENDA,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	24
3.3. Program dan Kegiatan.....	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
BAB V PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diawali Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD, selanjutnya perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah memuat program-program sebagai penjabaran Renstra SKPD dan RKPD, bertujuan untuk keselarasan dan kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah, dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan

dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program K/L dan Provinsi. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah dalam proses penyusunan RAPBD.

Atas dasar hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan dapat menjalankan tugas-tugas pokok dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Harapan tersebut akan menjadi komitmen kami yang dapat dituangkan dalam suatu perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa “Rencana Kerja Tahun 2022”.

1. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pijakan dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor Tahuntentang . tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan Program Kegiatan yang memuat sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Indikator kinerja sasaran dan target masing-masing indikator sasaran Program yang direncanakan dapat mendorong percepatan terwujudnya Visi, Misi, dan Program Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2025.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempedomani Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menjadi Acuan Umum dalam menentukan Program dan Kegiatan yang akan dibahas dalam Rangkaian dan Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten secara berjenjang sehingga dapat lebih terjamin dan mempermudah pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 adalah untuk:

- Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati kedalam Bentuk Kebijakan dan Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
- Sebagai Instrumen untuk mempermudah dalam mengukur Kinerja dan mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tertentu.
- Meningkatkan Efisiensi dan efektifitas Pemanfaatan Sumber-sumber Potensi Daerah. Terutama berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Menjelaskan tugas – tugas pokok dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah, sebagai berikut :

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 6 Program (5 Program Pendukung dan 1 Program Utama), program pendukung yang, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan tingkat realisasi Renja sebesar 100%, tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Aparatur dengan tingkat realisasi Renja sebesar 98,62%, tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 95,01%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan tingkat realisasi Renja sebesar 100%, tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 98,75%
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan tingkat realisasi Renja sebesar 100%, tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 100%
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan dengan tingkat realisasi Renja sebesar 99,19% tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 99,19%

Program Utama yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2020 yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target Renja sebesar 5,3%

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKUANAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENJA SKPD S/D TAHUN 2020

NAMA SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KODE	URUSAN/BID. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENTRA SID) TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 (n=2)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SID TAHUN 2019 (n=3)	TARGET RENJA TAHUN 2020 (n=2)	REALISASI RENJA TAHUN 2020 (n=2)	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI KEGIATAN RENJA TAHUN 2021 (n-1)	TINGKAT CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SID TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENTRA SKPD SID TAHUN BERJALAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SID TAHUN 2019 (n=3)	REALISASI RENJA TAHUN 2020 (n=2)								
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Pendukung)	Meningkatnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	12 Bulan	72 Bulan	100%	BAPENDA KAB TANJAB BARAT
1 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	12 Bulan	72 Bulan	100%	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	12 Bulan	72 Bulan	100%	
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	12 Bulan	72 Bulan	100%	
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	12 Bulan	72 Bulan	100%	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	12 Bulan	72 Bulan	100%	
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	12 Bulan	72 Bulan	100%	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100 %	66,67 %	16,67 %	16,67 %	100%	16,67 %	100%	16,67 %	72 Bulan	100%	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/ majalah	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	12 Bulan	72 Bulan	100%	
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat, jamuan tamu dan petugas pihak pelayanan	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	12 Bulan	72 Bulan	100%	
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	72 Bulan	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	12 Bulan	72 Bulan	100%	
28	Penyediaan Iklan Layanan	Terlaksananya iklan layanan	100 %	66,67 %	16,67 %	16,67 %	100%	16,67 %	100%	16,67 %	100 %	100%	
20	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Pendukung)	Meningkatnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas	100 %	61,90 %	16,67 %	16,44 %	98,62%	16,67 %	95,01 %	95,01 %			
22	Pembangunan Gedung Kantor	Terperluinya biaya rehabilitasi kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	-	-	-	-	1 Paket	100%	
26	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya sarana prasarana aparat	100 %	50,00 %	25,00 %	25,00 %	100%	75,00 %	75,00 %				
32	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100 %	66,67 %	16,67 %	16,67 %	99,98%	16,67 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	

I	2	3	4	5	6	7	8= (76)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
84 Operasional	Penelitian Rutiin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Pemeliharaan Rutiin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	232 Unit	151 Unit	43 Unit	43 Unit	100%	43 Unit	237 Unit	102,16%	
03	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor	100 %	59,10 %	16,67 %	15,56 %	93,34%	16,67 %	91,33 %	91,33%	
02	Penilaian Adminstrasi Barang Inventaris Kantor	Tersedianya Data Adminstrasi Barang Inventaris Kantor	5 Paket	5 Paket					5 Paket	100,00%	
05	Penilaian Adminstrasi Barang Inventaris Kantor	48 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	100,00%		
06	Peningkatan Disiplin Aparatur (Program Pendukung)	Meningkatnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas	100 %	64,28 %	17,86 %	17,86 %	100%	17,86 %	100,00 %	100,00%	
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan seragam untuk PNS, TKS/TKK yang disediakan	1.461 Stel	931 Stel	275 Stel	275 Stel	100%	255 Stel	1461 Stel	100,00%	
18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Program Pendukung)	Meningkatnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas	100 %	98,75 %					98,75 %	98,75%	
21	Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Relatihan Peningkalan Kemampuan Kapasitas SDM ASN	100 %	98,75 %					98,75 %	98,75%	
22	Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Meminimalisir permasalahan PBB-P2 yang terjadi diwiliyah kecamatan, kelurahan dan desa	1 Kali	1 Kali					1 Kali	100,00%	
53	Bimtek Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Membentuk Kulatias SDM di Desa/ Kelurahan yang cakap dalam mendata OP PBB P2	100 %	100 %					100 %	100,00%	
78	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Program Pendukung)	Meningkatnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas	100 %	59,19 %	20 %	20,00 %	100,00%	20 %	98,19 %	98,19%	
54	Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah Pendapatan Daerah	Laporan Penerimaan Daerah yang akurat	12 Bulan	12 Bulan					12 Bulan	100,00%	
78	Rekonsiliasi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah Laporan yang disusun	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100,00%	
	Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Pengelola Pendapatan Daerah	Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Daerah dengan SKPD	36 Bulan	36 Bulan					36 Bulan	100,00%	
	Rekonsiliasi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	4 Kali	4 Kali					4 Kali	99,19%	
	Rekonsiliasi Penerimaan dan Piutang PBB P2	Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan dan Piutang PBB P2	13 Kec	13 Kec					13 Kec	100,00%	
	Penyusunan Perencanaan Program Kerja Dinas	Jumlah Dokumen yang disusun	25 Dok Renja 10 Dok RKA	15 Dok Renja 6 Dok RKA	5 Dok Renja 2 Dok RKA	100%	5 Dok Renja 2 Dok RKA	20 Dok Renja 8 Dok RKA	20 Dok Renja 8 Dok RKA	100,00%	
	Penyusunan Perencanaan Strategi	Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen					2 Dokumen	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11-(10/4)	12
51 Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah	Tersedianya Data Penerimaan Pendapatan Daerah yang akurat dan akuntabel	24 Buku Lap	24 Buku Lap						24 Buku Lap	100,00%	
71 Penatausahaan dan Pembukuan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya administrasi yang teratur dan teritib	48 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	100,00%		
61 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Program Utama)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	5,7 %	5,10 %	5,3 %	(3,51) %	(66,31)	5,7 %	5,7 %	80,00%		
48 Verifikasi Data Objek dan Subjek BPHTB dan PBB-P2	Data Objek dan Subjek BPHTB yang Valid dan akuntabel	100 %	100 %						100 %	100,00%	
49 Verifikasi dan Validasi Data Objek dan Subjek PBB-P2	Jumlah Data Objek dan Subjek PBB-P2 yang diverifikasi	13.000 OP	16.085 OP						16085 OP	123,73%	
50 Verifikasi dan Validasi Pelayanan BPHTB	Jumlah Data Objek BPHTB yang diverifikasi	2.800 OP	1698 OP	700 OP	934 OP	133%	700 OP	332 OP	119,00%		
52 Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah	24 Bulan	24 Bulan						24 Bulan	100,00%	
55 Evaluasi Penerimaan PBB-P2	Terlaksananya Penerimaan PBB P2	6 M	4,633 M	6 M	4,30 M	71,67%	6 M	4,978 M	82,96%		
57 Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2 yang dilaksanakan	Jumlah Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2 yang dilaksanakan	5 Kali	3 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	5 Kali	100,00%		
59 Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak, DAU dan Koordinasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan	Terseedianya buku laporan penerimaan dana perimbangan	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan	100,00%	
79 Koordinasi Peningkatan Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Dana Bagi Hasil Pajak	Tercapainya target penerimaan Dana Perimbangan	1,1 T	1.0495 T						1.0495 T	95,41%	
66 Koordinasi Peningkatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Syah	Terseedianya Buku Laporan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	28 M	33,848 M						33,848 M	120,89%	
81 Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	100 %	73,75 %	20 %	- %	0%	- %		100 %	100,00%	
77 Pendataan dan Penutakhiran Data Objek dan Subjek PBB-P2	Jumlah Data Wajib Pajak PBB-P2	32.666 OP	27141 OP	7.000 OP	5.784 OP	82,63%	7.000 OP	39.925 OP	122,22%		
82 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya Target Penerimaan Pendapatan Daerah	10 Kali	6 Kali	2 Kali	100%	2 Kali	100 %	10 Kali	100,00%		
63 Kajian dan Pronostis Peningkatan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Kajian Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	100 %	73,75 %	20 %	20,00 %	100,00%	6 %	99,75 %	99,75%		
47 Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah	100 %	60 %	20 %	20 %	100,00%	20 %	100,00 %	100,00 %		
56 Penyusunan Statistik Pendapatan Daerah	Jumlah jenis pajak dan benda berharga	40 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	100%	40 Jenis	100 %	40 Jenis	100,00%		
Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah buku Informasi Data Statistik Pendapatan Daerah	360 Buku	200 Buku						200 Buku	55,56%	
	Jumlah Pendataan dan Pendataan Pajak Daerah	69.500 SKPD	38319 SPTPD / SKPD	14.600 SPTPD / SKPD	9.823 SPTPD / SKPD	67,28%	14.600 SPTPD / SKPD	62.742 SPTPD / SKPD	90,28%		

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8=(7/6)</i>	<i>9</i>	<i>10=(5+7+9)</i>	<i>11=(10/4)</i>	<i>12</i>
58	Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB-P2	Terlaksananya Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB-P2	48 Bulan	48 Bulan					48 Bulan	100,00%	
	Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB-P2 dan 9 Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya data berbasis sistem informasi pengelolaan pajak yang efektif, transparan dan akurat	24 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan			24 Bulan	100,00%	
74	Koordinasi Penetapan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pendapatan Daerah	60 Bulan	36 Bulan	100%	12 Bulan			60 Bulan	100,00%	
	Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah	Jumlah Koordinasi Peningkalan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang San yang dilaksanakan	56 Kali	24 Kali	16 Kali	8 Kali	50%	16 Kali	48 Kali	85,71%	
65	Pelayanan Mobil Kelling PBB-P2	Jumlah Pelayanan Mobil Kelling PBB-P2 yang dilaksanakan	11 Kec 344 Kali	11 Kec 168	11 Kec 4 Kali	11 Kec 4 Kali	100,00%	11 Kec 88 Kali	11 Kec 255 Kali	74,13%	
	Pelaporan Penetapan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	75%	12 Bulan	36 Bulan	100,00%	
67	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah penagihan pajak daerah	60.882 SSPD	51172 SSPD	10.441 SSPD	9.803 SSPD	94%	10.441 SSPD	71.416 SSPD	117,30%	
	Penyampaian dan Penagihan PBB P2	Jumlah Penyampaian SPPT dan Penagihan PBB-P2 BPHN B	660.161 SPPT	411804 SPPT	110.000 SPPT	82.488 SPPT	74,98%	110.000 SPPT	604.292 SPPT	91,54%	
69	Penilaian dan Penetapan Pajak/Retribusi Daerah	Jumlah Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah	2.800 SPPT	1423 SPPT	700 SPPT	934 SPPT	133,43%	700 SPPT	3.057 SPPT	109,18%	
	Penetapan dan Pencetakan SPPT PBB-P2	Jumlah Penetapan dan Pencetakan SPPT PBB-P2	61.182 SKPD	51588 SKPD	10.441 SPTPD/ SKPD	9.822 SKPD	94%	10.441 SPTPD/ SKPD	71.851 SKPD	117,44%	
70	Intensifikasi Pajak Daerah	Terlaksananya Intensifikasi Pajak Daerah	2 Kali						114.000 SPPT	223.639 SPPT	98,09%
72	Sosialisasi Pajak Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah	1.850 WP	1850 WP					1.850 WP	100,00%	
	Penyuluhuan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah	750 WP	750 WP					750 WP	100,00%	
75	Penyuluhuan dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang mengikuti penyuluhan, Terlaksananya Ekstensifikasi Pajak Daerah	1.600 WP	750 WP	600 WP	80%	850 WP	1.450 WP	90,63%	0,00%	
64	Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah	Tersedianya Data Penerimaan Pendapatan Daerah yang akurat dan akuntabel	12 Bulku Lap	12 Bulku Lap					12 Bulku Lap	100,00%	
	Pengelolaan Data Sistem Informasi 9 Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya data berbasis sistem informasi pengelolaan pajak yang efektif, transparan dan akurat	48 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	100%	Bulan	48 Bulan	100,00%		
	Peningkatan Jaringan Komputerisasi Perpajakan Komputerisasi Pajak Daerah	Terlaksananya Peningkalan Jaringan Komputerisasi Perpajakan	100 %	92 %					92 %	92,00%	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Peningkalan Jaringan Komputerisasi Perpajakan	100 %	100 %					100 %	100,00%	
	Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Pendapatan Daerah	Peningkalan Pendapatan Daerah	100 %	100 %					100 %	100,00%	
		Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Pengelola Pajak	100 %	93,33 %					93,33 %	93,33%	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8=(7/6)</i>	<i>9</i>	<i>10=(5+7/9)</i>	<i>11=(10/4)</i>	<i>12</i>
Intensifikasi dan Eksifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	100 %	100 %						100 %	100,00%	
Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kali 2 Rakor	Kali 2 Rakor						Kali 2 Rakor	Kali 2 Rakor	
Intensifikasi dan Eksifikasi Pajak Daerah	Terlaksananya Intensifikasi dan Eksifikasi Pajak Daerah	Kali 2 Rakor	Kali 2 Rakor						Kali 2 Rakor	Kali 2 Rakor	
Eksifikasi dan Identifikasi Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Eksifikasi dan Identifikasi Pajak Daerah dan Retribusi	4.500 OP	4393 OP						4.393 OP	97,62%	
Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	12 Bulan 4 Tw	12 Bulan 4 Tw						12 Bulan 4 Tw	100%	
Penyelesaian Laporan Capaian Kinerja dan Inisiatif Realisasi Kinerja	Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Daerah dengan SKPD	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan	100%	
Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Pengelola Pendapatan Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	2 Kali	2 Kali						2 Kali	100%	
Penyelesaian Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Terlaksananya Penyusunan Renja dan RKA SKPD	1 Dok Renja 2 Dok RKA	1 Dok Renja 2 Dok RKA						1 Dok Renja 2 Dok RKA	100%	
Penyelesaian Penyelesaian Program Kerja Dinas	Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen	100%	
Penyelesaian Penyelesaian Strategi Optimalisasi Pelayanan Pembayaran Pajak/ Retribusi Daerah	Peningkatan Pelayanan Pajak/ Retribusi Daerah	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan	100%	
Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Peningkatan Penerimaan PAD Jumlah Rekonsiliasi Penerimaan Daerah dengan SKPD	Kali 4 Rakor	Kali 4 Rakor						Kali 4 Rakor	100%	
Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Pengelola Pendapatan Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan dan Piutang PBB P2	24 Bulan	24 Bulan						12 Bulan	50,00%	
Rekonsiliasi Penerimaan dan Piutang PBB P2 Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah	Tersedianya Data Penerimaan Pendapatan Daerah yang akurat dan akuntabel	Kac (2 thn)	13 Kac (2 thn)						12 Bulan	0,00%	
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (Program Pendukung)	Terkelolanya Sistem Administrasi Kepergawainan	100 %	100 %						100 %	100 %	
Pengelolaan Administrasi Kepergawainan	Terpenuhinya Data Administrasi Pegawai	12 Bulan	12 Bulan						12 Bulan	100%	
Program Penataan Peraturan Perundang- undangan (Program Pendukung)	Terlaksananya Pelaksanaan Pajak Daerah Sesuai Peraturan yang berlaku	100 %	100 %						100 %	100 %	
Klasifikasi dan Perimbangan Hukum Terhadap Pajak Daerah	Terlaksananya Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku	100 %	100 %						100 %	100 %	

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, selanjutnya kedepan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Capaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH			REALISASI CAPAIAN TAHUN 2019 (thn n-2)	TAHUN 2020 (thn n-1)	TAHUN 2021 (thn n)	PROYEKSI TAHUN 2020 (thn n-1)	CATATAN ANALISIS
			TAHUN 2019 (thn n-2)	TAHUN 2020 (thn n-1)	TAHUN 2021 (thn n)					
1	1 Tingkat kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	%	5,1	5,3	5,7	18,05	(3,51)		5,7	Realisasi capaian PAD Tahun 2020 dari target 5,3% terealisasi (3,51)%
2	2 Indeks Kepuasan Masyarakat	%	76,61	77	78	77,70	78,24		78	Realisasi capaian IKM Tahun 2020 dari target 77 terealisasi 78,24

Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 diukur dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2020 dan target Indikator Kinerja Utama dan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Daerah melalui penerimaan pendapatan asli daerah dengan indikator kinerja antara lain :

1. Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Target 5,3%.

Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 sebesar 5,3%, sedangkan untuk realisasi penerimaan PAD Tahun 2020 dari target 5,3% terealisasi -3,51%

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan target sebesar 77% terealisasi 78,24%

Dari beberapa indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Target 5,3% sampai dengan triwulan III Tahun 2020 sebesar -0,45% dengan capaian kinerja -8,82%

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Dalam upaya mewujudkan misi, tujuan, dan sasaran sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal maupun eksternal yang menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Kekuatan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola Pendapatan Daerah antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.
2. Tersedianya anggaran/dana yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Adapun Kelemahan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Sumber daya manusia yang belum memadai khususnya dalam hal pendapatan daerah
2. Masih kurangnya fasilitas untuk mengembangkan upaya pemungutan pajak/retribusi daerah

Peluang yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah
2. Adanya sistem dan prosedur serta pelimpahan wewenang sebagai dasar dan acuan mengelola keuangan daerah.
3. Kemajuan teknologi informasi dalam menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik.

Beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan (ancaman) dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibanya membayar pajak. Adanya motivasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang didukung dengan regulasi peraturan daerah, anggaran yang memadai yang ditunjang ketersediaan personil dan mobilitas operasional yang memadai untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah secara transparan. Peluang / potensi yang ada masih dapat untuk diberdayakan, apalagi kalau didukung oleh Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, ditunjang dengan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Tupoksi Badan Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan secara maksimal dengan memanfaatkan kewenangan dan ketersediaan anggaran dan sarana yang ada untuk meningkatkan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah. Diterapkannya sistem informasi manajemen Pendapatan Daerah, memadainya aparatur Badan Pendapatan Daerah baik kualitas maupun kuantitas, serta meningkatkan peran Badan Pendapatan Daerah untuk menghadapi berbagai tantangan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran agar dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan berbagai kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD diambil berdasarkan analisis kebutuhan dari tiap bidang yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun seiring dengan berjalannya waktu terdapat perubahan-perubahan kegiatan karena disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan yang diprioritaskan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan pada tabel berikut :

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02	KEUANGAN				15.172.979.649	KEUANGAN				16.395.896.000	
5.02. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAPENDA Kab. Tanjab Barat.	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai AKIP	78,00 68,00	12.197.979.649	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai AKIP	79,00 68,00	11.114.696.000	
5.02. 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	105.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	118.000.000	
5.02. 01.2.01.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah dokumen perencanaan	8 Dokumen	75.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah dokument perencanaan	4 Dokumen	75.000.000	
5.02. 01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Laporan realisasi capaian kinerja	12 Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Laporan realisasi capaian kinerja	12 Laporan	43.000.000	
5.02. 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.131.270.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.259.000.000	
5.02. 01.2.02.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang	7.800.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang	7.800.000.000	
5.02. 01.2.02.0	Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas ASN	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah waktu penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22 orang	276.270.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah waktu penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 orang	380.000.000	
5.02. 01.2.02.0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Jurnal Keuangan SKPD	12 Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Jurnal Keuangan SKPD	12 Laporan	41.000.000	
5.02. 01.2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Buku Besar Keuangan SKPD	12 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Buku Besar Keuangan SKPD	12 Laporan	38.000.000	
5.02. 01.2.02.0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	58.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	54.000.000	
5.02. 01.2.03.0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	58.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	54.000.000	
5.02. 01.2.05	Administrasi Kepegawaiwan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah dokumen Kepegawaiwan Perangkat Daerah	1 Dokumen	191.000.000	Administrasi Kepegawaiwan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah dokumen Kepegawaiwan Perangkat Daerah	1 Dokumen	265.000.000	
5.02. 01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	135 stel	81.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	135 stel	150.000.000	
5.02. 01.2.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Pelatihan yang dilikuti	14 kali	70.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	10 orang	75.000.000	
5.02. 01.2.05.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	8 orang	40.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	8 orang	40.000.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02. 01.2.0.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah penyediaan Umum Perangkat Daerah	991.863.649	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah waktu penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan	1.090.500.000
5.02. 01.2.0.6.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	39.806.618	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	375 buah
5.02. 01.2.0.6.0.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 jenis	199.857.031	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.935 buah
5.02. 01.2.0.6.0.0.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	914 kotak	20.60.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	914 kotak
5.02.	01.2.0.6.0.0.0.0	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Barang Celakan dan Penggandaan	6 jenis	75.000.000	Penyediaan Barang Celakan dan Penggandaan	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Barang Celakan dan Penggandaan	25.416 buah
5.02.	01.2.0.6.0.0.0.0.0	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	1.800 eksemplar	6.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800 eksemplar
5.02.	01.2.0.6.0.0.0.0.0.0	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	650.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah waktu penyediaan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan
5.02.	01.2.0.6.0.0.0.0.0.0.0	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.750.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 unit
5.02.	01.2.0.7	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						260.000.000
5.02.	01.2.0.7.0	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-				
5.02.	01.2.0.7.0.0	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
5.02.	01.2.0.7.0.0.0	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Kendaraan roda 4	2 unit	1.400.000.000				
5.02.	01.2.0.7.0.0.0.0	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Kendaraan roda 4	7 unit	140.000.000				
5.02.	01.2.0.7.0.0.0.0.0	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Kendaraan roda 2						
5.02.	01.2.0.7.0.0.0.0.0.0	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Mebel	20 set	110.000.000	Pengadaan Mebel	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Mebel	20 set
5.02.	01.2.0.7.0.0.0.0.0.0.0	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	70 unit
5.02.	01.2.0.7.0.0.0.0.0.0.0.0	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	365.096.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
5.02.	01.2.0.8	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						371.196.000
5.02.	01.2.0.8.0	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.100.000
5.02.	01.2.0.8.0.0	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	285.096.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
5.02.	01.2.0.8.0.0.0	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah waktu Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	60.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah waktu Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02. 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	605.750.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Diterapkan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178 unit	178 unit	697.000.000	
5.02. 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	1 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	1 unit	72.000.000	
5.02. 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	45 unit	215.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41 unit	260.000.000	
5.02. 01.2.09.03	Pemeliharaan Mebel yang dipelihara	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Mebel yang dipelihara	13 unit	2.600.000	Pemeliharaan Mebel	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Mebel yang dipelihara	13 unit	5.000.000	
5.02. 01.2.09.04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 jenis	168.950.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	120 unit	185.000.000	
5.02. 01.2.09.05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	168.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	175.000.000	
5.02. 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan	8,06 %	2.975.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan	8,06 %	5.281.200.000	
5.02. 04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	121.334.459.817,10	2.975.000.000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	121.334.459.817,10	5.281.200.000	
5.02. 04.2.01.0	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	80.000.000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Daerah	2 Dokumen	150.000.000	
5.02. 04.2.01.01	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah	1 dokument	220.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Dokumen Kebijakan Pajak Daerah	1 dokument	210.000.000	
5.02. 04.2.01.02	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah penyuluhan pajak daerah	6 kali	80.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Produk Hukum Pengelolaan Pajak Daerah	1 produk hukum	214.500.000	
5.02. 04.2.01.03	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 media	150.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 unit	350.000.000	
5.02. 04.2.01.04	Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah (9 Pajak Daerah)	7.500 OPWP	300.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran BPHTB	560 OPWP	475.000.000	
5.02. 04.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1300 OPWP	15.000 OPWP	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjah Barat	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran PBB P2	1300 OPWP	15.000 OPWP	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Keputuhan					
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		Catatan Penting	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5.02	04.2.01.0 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5 aplikasi	180.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 aplikasi	650.000.000			
5.02	04.2.01.0 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah SPPT PBB P2 yang ditelaikan	105.050 SPPT PBB P2	860.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah SPPT PBB P2 yang ditelaikan	105.050 SPPT PBB P2	850.000.000			
5.02	04.2.01.0 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah SPPT PBB P2 yang ditelaikan	105.050 SPPT PBB P2	860.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah SPPT PBB P2 yang ditelaikan	105.050 SPPT PBB P2	850.000.000			
5.02	04.2.01.0 Penilaian Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah SPPTD yang diterbitkan	10.300 SPPTD	245.000.000	Pelaporan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah SKPD yang diterbitkan	2.000 SKPD	500.000.000			
5.02	04.2.01.0 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah WP yang berkonsultasi tentang Pajak Daerah	100 WP	65.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah SPPT yang diterbitkan	108.600 SPPT PBB P2				
5.02	04.2.01.1 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Data Objek PBB-P2	4.040 objek PBB	185.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah WP yang berkonsultasi tentang Pajak Daerah	40 WP	88.000.000			
5.02	04.2.01.1 Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Data Objek BPHTB	550 objek BPHTB			BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah SPPTD yang terbit	8.000 SPPTD	368.700.000			
5.02	04.2.01.1 Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah pajak daerah yang ditagih (9 Pajak Daerah)	10.300 SSPTD	160.000.000	Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah SPSPD BPHTB yang terbit	50 SPSPD P2	900.000.000			
5.02	04.2.01.1 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang diselesaikan	10 OP	25.000.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah keberatan pajak daerah yang diselesaikan	25 WP	100.000.000			
5.02	04.2.01.1 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah uji pelik pada objek pajak	30 objek pajak	300.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Pemutakhiran Data OP PBB	1.000 OPMP	250.000.000			
5.02	04.2.01.1 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah penertiban wajib pajak	20 wajib pajak				Jumlah penertiban wajib pajak	75 WP				
5.02	04.2.01.1 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12 laporan	125.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12 laporan	175.000.000			
			Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 kali				Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 kali				
			JUMLAH		15.172.979.649	JUMLAH		JUMLAH		16.395.896.000			

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan RKPD, dengan fokus terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan otonomi daerah yang paralel dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud dan amanat undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diperlukan suatu pedoman yang memberikan arahan dan strategi kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan Penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, Strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat Indikatif.

Rencana Kerja Tahunan merupakan pedoman bagi terlaksananya pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dari unsur pokok yang terdapat kewenangan, antara lain unsur pendapatan daerah, tentunya akan menjadi tanggung jawab seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah dan sekaligus untuk memberikan inspirasi, motivasi, inisiatif, kreatifitas serta pedoman di dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL.
TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2022
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Optimalisasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,36 %

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumbedaya dan sumber dana tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TABEL T-C.33

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kelebihan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	KEUANGAN								
5.02. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai AKIP	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	79,00	11.114.696,000	APBD	\$0,00	11.658.750,000	17.734.000,000
5.02. 01.2.01	Perekembangan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	69,00			\$925		
5.02. 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	4 Dokumen	75.000,000	APBD		8 Dokumen	78.750,000
5.02. 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan realisasi capaian kinerja	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 Laporan	43.000,000	APBD		12 Laporan	48.000,000
5.02. 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	1 Dokumen	\$ 259.000.000			1 Dokumen	8.511.000.000
5.02. 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	55 orang	7.800.000.000	APBD		55 orang	8.000.000.000
5.02. 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	16 orang	380.000.000	APBD		16 orang	425.000.000
5.02. 01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Jurnal Keuangan SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 Laporan	41.000.000	APBD		12 Laporan	43.000.000
5.02. 01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Buku Besar Keuangan SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 Laporan	38.000.000	APBD		12 Laporan	43.000.000
5.02. 01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	1 Dokumen	54.000.000			1 Dokumen	58.000.000
5.02. 01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 Laporan	54.000.000	APBD		12 Laporan	58.000.000
5.02. 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	1 Dokumen	265.000.000			1 Dokumen	305.000.000
5.02. 01.2.05.02	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	135 stel	150.000.000	APBD		140 stel	180.000.000
5.02. 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	10 orang	75.000.000	APBD		10 orang	75.000.000
5.02. 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	8 orang	40.000.000	APBD		8 orang	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penjelasan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			
5.02.. 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 bulan	1.090.500.000		12 bulan		1.273.000.000
5.02.. 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	375 buah	45.000.000	APBD	375 buah		50.000.000
5.02.. 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	4.985 buah	200.000.000	APBD	4.985 buah		200.000.000
5.02.. 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	914 kotak	38.000.000	APBD	914 kotak		40.000.000
5.02.. 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	25.416 buah	150.000.000	APBD	25.416 buah		175.000.000
5.02.. 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	1.800 eksemplar	7.500.000	APBD	1.800 eksemplar		8.000.000
5.02.. 01.2.06.09	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 bulan	650.000.000	APBD	12 bulan		800.000.000
5.02.. 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	90 unit	260.000.000		90 unit		260.000.000
5.02.. 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	20 set	110.000.000	APBD	20 set		110.000.000
5.02.. 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	70 unit	150.000.000	APBD	70 unit		150.000.000
5.02.. 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 bulan	371.196.000		12 bulan		385.000.000
5.02.. 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 bulan	11.100.000	APBD	12 bulan		15.000.000
5.02.. 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 bulan	295.096.000	APBD	12 bulan		300.000.000
5.02.. 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	12 bulan	65.000.000	APBD	12 bulan		70.000.000
5.02.. 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	178 unit	697.000.000		160 unit		740.000.000
5.02.. 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	1 unit	72.000.000	APBD	1 unit		75.000.000
5.02.. 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Penitinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Penitinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	41 unit	280.000.000	APBD	45 unit		280.000.000
5.02.. 01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	13 unit	5.000.000	APBD	11 unit		5.000.000
5.02.. 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	120 unit	185.000.000	APBD	100 unit		195.000.000
5.02.. 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA Kab.Tanjab Barat	3 unit	175.000.000	APBD	3 unit		185.000.000

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

Rencana Tahun 2022

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penang.	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		
5.02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan	BAPENDA Kab.Tanjung Barat	8.36 %	5.281.200.000			8.47 %
5.02 04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	BAPENDA Kab.Tanjung Barat	96.135.351.006,00	5.281.200.000			104.860.000.000,00
5.02 04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Penerimaan Pendapatan Daerah	BAPENDA Kab.Tanjung Barat	2 Dokumen	150.000.000	APBD		2 Dokumen
5.02 04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjung Barat	1 dokument	210.000.000	APBD		2 dokument
5.02 04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Produk Hukum Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjung Barat	1 produk hukum				1 produk hukum
5.02 04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjung Barat	8 kali	214.500.000	APBD		10 kali
5.02 04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjung Barat	3 unit	350.000.000	APBD		1 unit
5.02 04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran BPHTB	BAPENDA Kab.Tanjung Barat	550 OPWP	475.000.000	APBD		600 OPWP
5.02 04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah SPPT PBB P2 yang ditetapkan	BAPENDA Kab.Tanjung Barat	1.300 OPWP				1.350 OPWP
5.02 04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SSPD BPHTB yang ditetatkan	BAPENDA Kab.Tanjung Barat	15.000 OPWP				15.100 OPWP
5.02 04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah SKPD yang diterbitkan	BAPENDA Kab.Tanjung Barat	4 aplikasi	650.000.000	APBD		4 aplikasi
5.02 04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah SPPT yang diterbitkan	BAPENDA Kab.Tanjung Barat	10.600 SPPT PBB P2	850.000.000	APBD		15.100 SPPT P2
		Jumlah SPPT yang berkonsultasi tentang Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjung Barat	550 SSPD BPHTB				600 SSPD BPHTB
		Jumlah WP yang terbit	BAPENDA Kab.Tanjung Barat	108.600 SPPT PBB P2	500.000.000	APBD		2.200 SKPD
		Jumlah SPPT yang terbit	BAPENDA Kab.Tanjung Barat	40 WP	88.000.000	APBD		108.650 SPPT PBB P2
		Jumlah SPTPD yang terbit	BAPENDA Kab.Tanjung Barat	8.000 SPTPD	368.700.000	APBD		40 WP
		Jumlah SSPD BPHTB yang terbit	BAPENDA Kab.Tanjung Barat	550 SSPD BPHTB				150.000.000
								600 SSPD BPHTB
								450.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan (outcome)	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
5.02 04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB P2 yang ditagih Jumlah SSPD yang ditagih	BAPENDA Kab.Tanjung Barat	50 SPPT PBB P2 5.686 SSPD	900.000.000	APBD	50 SPPT PBB P2 6.073 SSPD	950.000.000
5.02 04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang diselesaikan	BAPENDA Kab.Tanjung Barat	25 WP	100.000.000	APBD	25 OP	125.000.000
5.02 04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Pemutakhiran Data OP PBB Jumlah Penertiban dan Pemeriksaan Pajak Daerah	BAPENDA Kab.Tanjung Barat	1.000 OPWP 75 WP	250.000.000	APBD	1.010 OPWP 85 WP	300.000.000
5.02 04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA Kab.Tanjung Barat	12 laporan 4 kali	175.000.000	APBD	12 laporan 4 kali	225.750.000
		JUMLAH			16.395.836.000			17.734.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, penyusunan program pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus berlanjut diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	APBD
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
1	Pengelolaan pendapatan Daerah	APBD

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki, sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu serta bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022.

Demikian Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020, dalam penyusunan dokumen ini maka saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Kami juga berharap agar dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahn 2022.

Kuala Tungkal,

KEPALA BAPENDA,